

TATA KELOLA GEREJA PADA GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) RAWA KALONG

Mochamad Muslih

STIE Tri Bhakti

mochamadmuslih@stietribhakti.ac.id

Afriyanti Delfira

STIE Tri Bhakti

afriyanti300@gmail.com

Martina Uli Silalahi

STIE Tri Bhakti

martinauli23@gmail.com

Tri Rizky Amelia

STIE Tri Bhakti

rizkycamelia04@gmail.com

Abstrak

Gereja merupakan organisasi nirlaba yang dianggap penting untuk menerapkan tata kelola karena gereja dimiliki oleh publik. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk membantu GBI Rawa Kalong menerapkan tata kelola yang sesuai. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode asistensi. Data diperoleh dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Asistensi dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan implementasi. Berdasarkan hasil pengamatan GBI Rawa Kalong belum memiliki tata kelola yang memadai. GBI Rawa Kalong tidak memiliki standar buku pedoman Gereja sendiri untuk tata kelola karena mengikuti aturan yang dipakai diseluruh Gereja Bethel Indonesia. Laporan keuangan yang dilaporkan setiap bulannya hanya berdasarkan pemasukan dan pengeluaran yang disesuaikan dengan setiap bidang-bidang yang ada. GBI Rawa Kalong belum menerapkan tata kelola gereja yang memadai. Hasil pengabdian adalah konsep tata kelola dan bangun tata kelola GBI Rawa Kalong dan beberapa proses tambahan tata kelola yang dibutuhkan oleh GBI Rawa Kalong.

Kata kunci: Pengabdian kepada masyarakat, tata kelola gereja, bangun tata kelola.

PENDAHULUAN

Gereja merupakan salah satu organisasi sektor publik yang bertanggungjawab kepada masyarakat, terutama kepada para jemaatnya. Gereja melayani kepentingan para jemaatnya di bidang agama. Sumber dana gereja sebagian besar dari jemaatnya. Pengelolaan yang salah akan berdampak pada pelayanan kepada para jemaatnya. Karena itu gereja perlu menerapkan tata kelola gereja yang baik atau good church governance.

Menurut Iwan Darmansjah (2007) *Governance* merupakan konsep dan berarti: proses pengambilan keputusan dan juga proses bagaimana keputusan itu ditentukan, diambil dan diimplementasikan. *Good Governance* merupakan suatu outcome yang terdiri dari norma, suatu hasil akhir yang terdiri dari proses. *Good Corporate Governance* tidak hanya berlaku pada perusahaan korporat saja tetapi berlaku juga pada organisasi bahkan dalam ilmu teknologi informasi teknologi yang dikenal dengan *IT Governance*. Dengan adanya *Good Corporate Governance* memberikan cara pandang baru bagi setiap organisasi agar menata dan mengelola lingkungan organisasinya secara baik dan saling bersinergi agar dapat mencapai visi dan misi yang ditetapkan bersama. Tiga elemen dalam mengelola tata kelola yang baik yakni struktur tata kelola, mekanisme tata kelola dan prinsip tata kelola. Ketiga elemen ini menjadi satu kesatuan artinya saling berkaitan. Implementasi tata kelola yang efektif dan efisien tidak hanya sebatas pada lingkungan organisasi profit dan pemerintahan saja tetapi berlaku juga pada organisasi non profit lainnya seperti Gereja. Gereja sebagai salah satu lembaga non profit yang bergerak dibidang pelayanan hidup rohani dan iman melalui ajaran dan hukum-hukumnya memerlukan tata kelola yang baik karena mengandalkan partisipasi umat sebagai roda penggerak melalui derma dan donasi. Banyak berita dan informasi yang mengabarkan tentang munculnya masalah pelayanan dalam lembaga Gereja menunjukkan bahwa Gereja harus menerapkan konsep tata kelola yang baik agar menjadi lembaga non sekuler yang suci dan sakral sehingga menjadi pedoman bagi kehidupan jemaatnya.

Salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan Gereja sebagai lembaga organisasi non profit berkaitan dengan tata kelola keuangan. Tata kelola yang baik pada Gereja akan menghasilkan manfaat yang baik bagi jemaatnya dan sebaliknya jika pengelolaan keuangan tidak baik akan muncul konflik atau masalah di dalam tubuh Gereja sehingga muncul ketidakpercayaan jemaat kepada pemimpin dan pengurus Gereja. Contoh masalah yang sering terjadi pada laporan keuangan Gereja seperti salah perhitungan atau pencatatan pada laporan keuangan Gereja. Dengan begitu, menunjukkan bahwa ternyata Gereja masih memiliki kelemahan dalam mengelola keuangannya

Perusahaan atau organisasi non profit merupakan sebuah organisasi atau sekumpulan individu yang berkumpul dan bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dalam pelaksanaannya, mereka tidak berpotensi untuk bisa mendapatkan keuntungan atau laba. Organisasi non profit dikenal dengan organisasi nirlaba yang dimana sasarannya hanya untuk mendukung suatu kebijakan dan memecahkan masalah yang terjadi di suatu organisasi. Dengan tujuan yang komersial atau tidak menarik perhatian terhadap suatu yang bersifat mencari keuntungan. Organisasi nirlaba berbentuk seperti yayasan, rumah sakit, politik, sekolah, dan keagamaan. Menurut Widodo dan Kustiawan yakni organisasi non profit sebagai salah satu instansi yang pada saat beroperasi tidak mencari laba atau keuntungan. Dalam artian lembaga nirlaba ini adalah kumpulan dari beberapa orang yang bertujuan sama dan mencapai tujuan mulia. Menurut PSAK 45 menjelaskan organisasi yang memperoleh sumbangan yang berasal dari sumbangan pihak anggota. Artinya, penyumbang tidak mengharapkan keuntungan bila suatu saat organisasi tersebut berkembang.

Organisasi gereja merupakan organisasi nirlaba, karena setiap kegiatan dan sumber daya operasi yang dilakukan berasal dari sumbangan anggota umat atau jemaat dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan tersebut melainkan para penyumbang memberi dengan sukarelawan. Gereja kristen merupakan Yayasan Gerejawi, didirikan berdasarkan surat pendirian Gereja dan didaftarkan secara hukum serta disesuaikan dengan Undang Undang No 28 Tahun 2004 Pasal 71 yang mengatur tentang yayasan. Setiap Gereja memiliki tata dasar yang berbeda-beda karena tata dasar Gereja merupakan suatu landasan berorganisasi Gereja yang meliputi beberapa dasar diantaranya, tempat kedudukan dan waktu, pengakuan iman, asas, tujuan, keanggotaan, bentuk pemerintahan Gerejawi dan struktur, penerimaan anggota, serta perubahan dan tata dasar.

Menurut Mardiasmo 2004:20 akuntabilitas publik terdiri dari dua macam yaitu: pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Pola pertanggungjawaban Gereja sama dengan yayasan pada umumnya bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban bendahara kepada majelis sinode. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas yaitu jemaat Gereja. Struktur organisasi Gereja memiliki beberapa macam dengan kebutuhan dan cakupan yang dimiliki seperti sinode, dan jemaat. Dalam mengatur dan menjalankan tugas-tugasnya struktur organisasi dibagi atas Gembala, Wakil Gembala, Sekretaris dan Bendahara. Untuk menjalankan tugas khusus maka dibentuk dua koordinator diantaranya koordinator diakonia (pelayanan yang bersifat sosial, sarana dan prasarana, rumah tangga) dan koordinator koinonia (pelayanan yang bersifat kategorial jemaat dan pelayanan musik). Kedua koordinator tersebut disesuaikan dengan keperluan jemaat.

Pengabdian kepada masyarakat ini akan menjelaskan hasil dari wawancara tahap awal kepada Gembala Sidang Gereja bernama Pdt. Samuel diketahui sejarah Gereja GBI Setia Mekar, tahun 2005 Pdt. Timotius Sahari meninggal dunia sehingga menimbulkan kekacauan karena pemimpin yang baru yang merupakan istri dari gembala memutuskan untuk membubarkan pengurus gereja di atas mimbar saat ibadah berlangsung sehingga pengurus merasa tersinggung. Setelah ibadah berlangsung, Pdt. samuel berbicara secara pribadi kepada beliau dengan maksud untuk menyelesaikan masalah dan memperdamai suasana tetapi beliau tidak sepakat dan tetap pada pendiriannya. Dari kondisi tersebut, terjadilah perpecahan jemaat dan Pdt.Samuel memberitahukan kepada salah satu pengurus bernama I Ketut Widiassa untuk memutuskan keluar dari gereja tersebut dan pindah pelayanan dan bertanya juga kepada Bp.Pdt.Sahala Nainggolan sehingga mereka memberikan saran untuk membuka gereja sendiri. Ketika Pdt.Samuel sudah keluar maka beberapa jemaat yang sudah keluar ingin bergabung kepada Pdt.Samuel dengan membuat persekutuan terlebih dahulu dengan cara dari pintu ke pintu. Berjalan beberapa bulan kemudian, jemaat meminta kepada Bp.Pdt.Samuel untuk memiliki gereja sehingga akhirnya berusaha untuk mempunyai gereja dengan cara mengontrak untuk membangun gereja dan beribadah dengan apa adanya tetapi tantangan terus ada seperti dari masyarakat sekitar dan Ibu Gembala Marsiah dengan cukup lama tapi Puji Tuhan atas ijinNya Pdt.Samuel dan jemaat bisa membeli sebidang tanah dengan kredit kepada Bp Wiliam karena beliau menjual tanahnya dengan cara di kapling. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Gereja GBI Rawa Kalong dapat dibangun dengan sederhana. Setiap masalah ada jawaban dan pastinya masalah terus datang. Contoh kasus yang paling nyata yang saat ini dialami oleh gereja GBI Rawa Kalong yakni sampai saat ini belum dapat memiliki lahan parkir kendaraan. Karna saat ini gereja GBI Rawa Kalong dalam jumlah jemaat mengalami perkembangan jiwa dan ada sekitar 150 jiwa atau anggota jemaat. Gereja merupakan badan hukum ketika sudah memenuhi syarat yakni memiliki harta kekayaan sendiri. Gereja di golongkan kedalam organisasi non laba karna bergerak dibidang pelayanan rohani dan keagamaan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan pemetaan dan perancangan konsep *corporate governance* atau tata kelola pada GBI Rawa Kalong. Fokus pengabdian ini adalah pada pengelolaan kegiatan dan keuangan yang berkaitan dengan sumber dana gereja yang diperoleh dari kolekte atau persembahan jemaat GBI Rawa Kalong. Pengabdian ini akan merancang pedoman umum tentang tata kelola yang baik dan benar menurut aturan dan praktek-praktek terbaik tata kelola pada GBI Rawa Kalong. Dengan demikian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi kepada pengurus guna untuk menghindari penyalahgunaan dana dari kolekte jemaat atau sumbangan

lainnya sehingga dapat menjaga kepercayaan umat untuk mempertahankan citra serta nama baik organisasi gereja GBI Rawa Kalong.

KAJIAN PUSTAKA

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance adalah suatu rangkaian proses yang berisi suatu rangkaian proses kebijakan, aturan, kebiasaan yang dapat mempengaruhi tata kelola suatu korporasi atau perusahaan. Rangkaian ini melibatkan para pemangku kepentingan atau stakeholders (pemegang saham, komisaris, direksi, dan jajaran lainnya). untuk tujuan dan pencapaian peningkatan perusahaan. Tata kelola merupakan aspek yang sangat penting yang diperhitungkan dalam sebuah organisasi termasuk Gereja.

Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip GCG dikenal dengan istilah TARIF, dan tarif itu adalah *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness* dengan penjelasan sebagai berikut :

1. *Transparency* adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. *Accountability* adalah perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. *Responsibility* adalah perusahaan harus mampu mematuhi peraturan perundang undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
4. *Independency* adalah perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing masing organisasi perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. *Fairness* adalah perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan saham atau pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No 45

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi.

Laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan pada perusahaan bisnis pada umumnya. Pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang harus disajikan dalam laporan keuangan organisasi nirlaba. Hal-hal yang tidak diatur dalam pernyataan standar akuntansi ini harus mengacu kepada pernyataan standar akuntansi yang berlaku umum.

Laporan posisi keuangan terdiri dari klafikasi aktiva dan kewajiban. Informasi mengenai liquiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyajikan aktiva berdasarkan urutan liquiditas, dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo.
- b. Mengelompokkan aktiva kedalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban kedalam jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mengungkapkan informasi mengenai liquiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan atas laporan keuangan.

Unsur-Unsur Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No 45 Laporan Poisisi Keuangan

Laporan posisi keuangan merupakan nama lain dari neraca pada laporan keuangan lembaga komersial. Laporan poisisi keuangan disebutkan dalam PSAK No 45 adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.

Dalam PSAK No 45, informasi liquiditas laporan posisi keuangan diberikan dengan cara berikut:

- 1) Menyajikan aktiva berdasarkan urutan liquiditas, dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo.
- 2) Mengelompokkan aktiva ke dalam aktiva lancar dan tidak lancar, dan kewajiban kedalam jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Mengungkapkan informasi mengenai liquiditas aktiva tau saat jatuh temponya kewajiban termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan atas laporan keuangan.

Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas berisi dua bagian besar yaitu besaran pendapatan dan biaya lembaga selama periode anggaran. Pendapatan digolongkan berdasarkan ikatan yang ada. Sedangkan beban atau biaya disajikan dalam laporan aktivitas berdasarkan kriteria fungsional, dengan demikian beban biaya akan terdiri dari biaya kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

Dalam PSAK No 45 menyebutkan bahwa tujuan utama laporan keuangan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi peristiwa lain mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaski, dan bagaimana penggunaan sumber daya alam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, dan pihak lainnya untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai kemampuan dan kesinambungan organsiasi dan meberikan jasa dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menunjukkan arus uang kas masuk dan keluar untuk suatu periode. Periode yang dimaksud adalah periode sama dengan yang digunakan oleh laporan aktivitas.

Penyajian arus kas masuk dan keluar harus digolongkan kedalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:

1) **Aktivitas Operasi**

Dalam kelompok ini adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan terkait dengan operasional lembaga.

2) **Aktivitas Investasi**

Termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi lembaga. Investasi dapat berupa pembelian/penjualan aktiva tetap, penempatan/pencairan dana depositi atau investasi lain.

3) **Aktivitas Pendanaan**

Termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang terkait dengan transaksi berupa penciptaan atau pelunasan kewajiban hutang lembaga dan kenaikan/penurunan aktiva bersih dari surplus defisit lembaga.

4) **Catatan atas laporan keuangan**

Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan diatas. Tujuan pembelian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan.

Pengertian Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan merupakan organisasi yang tergolong organisasi non profit yang secara khusus bergerak dibidang keagamaan seperti pada gereja, masjid, lembaga pengabaran injil, lembaga misi islam dan sebagainya (Kabuhung:2013). Organisasi keagamaan pada setiap organisasi memiliki bentuk yang berbeda seperti Gereja terdapat jenis utama bentuk organisasi yaitu jemaat atau *Congregational* atau *Episkopal*. Bentuk dari organisasi tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti GBI Rawa Kalong memiliki fungsi yang otonom dalam lingkungannya, dimana otoritas tertinggi ada pada Gembala Sidang. Keputusan-keputusan yang diambil dalam kongregasi harus bergantung pada persetujuan umat atau seluruh anggota kongregasi dan diputuskan oleh gembala sidang.

Booth (1993) merumuskan tiga unsur utama yang mempengaruhi penerapan akuntansi dan akuntabilitas dalam Gereja. Pertama, organisasi Gereja didominasi oleh doktrin suci dan konsep teologi yang berbeda-beda pada masing-masing aliran Gereja protestan, sehingga ada resistensi terhadap penggunaan akuntansi dalam Gereja. Kedua, resistensi dilakukan oleh karna pemimpin Gereja karena mereka mendominasi manajemen Gereja. Ketiga, resistensi juga muncul karena akuntansi dianggap sebagai media komunikasi yang dapat mengungkap kondisi riil apa yang ada dalam organisasi Gereja.

Pola pertanggungjawaban pada organisasi keagamaan masih sederhana. Menurut Halim 2012:459 menyatakan bahwa pola pertanggungjawaban di organisasi keagamaan dibedakan menjadi 2 pertanggungjawaban dan salah satunya pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya pengguna dan penerima layanan organisasi keagamaan yang bersangkutan.

METODE PENGABDIAN

Pendekatan pengabdian yang digunakan adalah dengan metode asistensi. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sosialisasi konsep tata kelola dan asistensi implementasi tata kelola gereja pada GBI Rawa Kalong.

Lokasi Pengabdian

Dalam pengabdian ini yang menjadi objek pengabdian adalah Gereja Bethel Indonesia Rawa Kalong yang berlokasi di Jl. Bumi Sani No.5 Setia Mekar, Kec. Tambun Selatan, Bekasi Jawa Barat kode pos 17510.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data awal dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan di analisa untuk keperluan asistensi tata kelola. Analisis dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Tujuan penarikan kesimpulan untuk mengetahui kondisi tata kelola yang ada sebelum dilakukan asistensi implementasi tata kelola.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah beberapa foto terkait kegiatan ibadah dan kegiatan asistensi di GBI Rawa Kalong:



Gambar 1 Ibadah Umum setiap Minggu



Gambar 2 Kegiatan Diakonia
Kunjungan besuk di RS



Gambar 3 Kegiatan Diakonia Ibadah
Pemakaman



Gambar 4 Kegiatan Wanita Bethel Indonesia



Gambar 5 Natal Pemuda



Gambar 6 Kegiatan Ibadah Natal
Sekolah Minggu



Gambar 7 Natal Pemuda



Gambar 8 Masyarakat Umum Sekitar Gereja

Hasil pemetaan konsep tata kelola GBI Rawa Kalong adalah seperti disajikan pada Tabel 1.

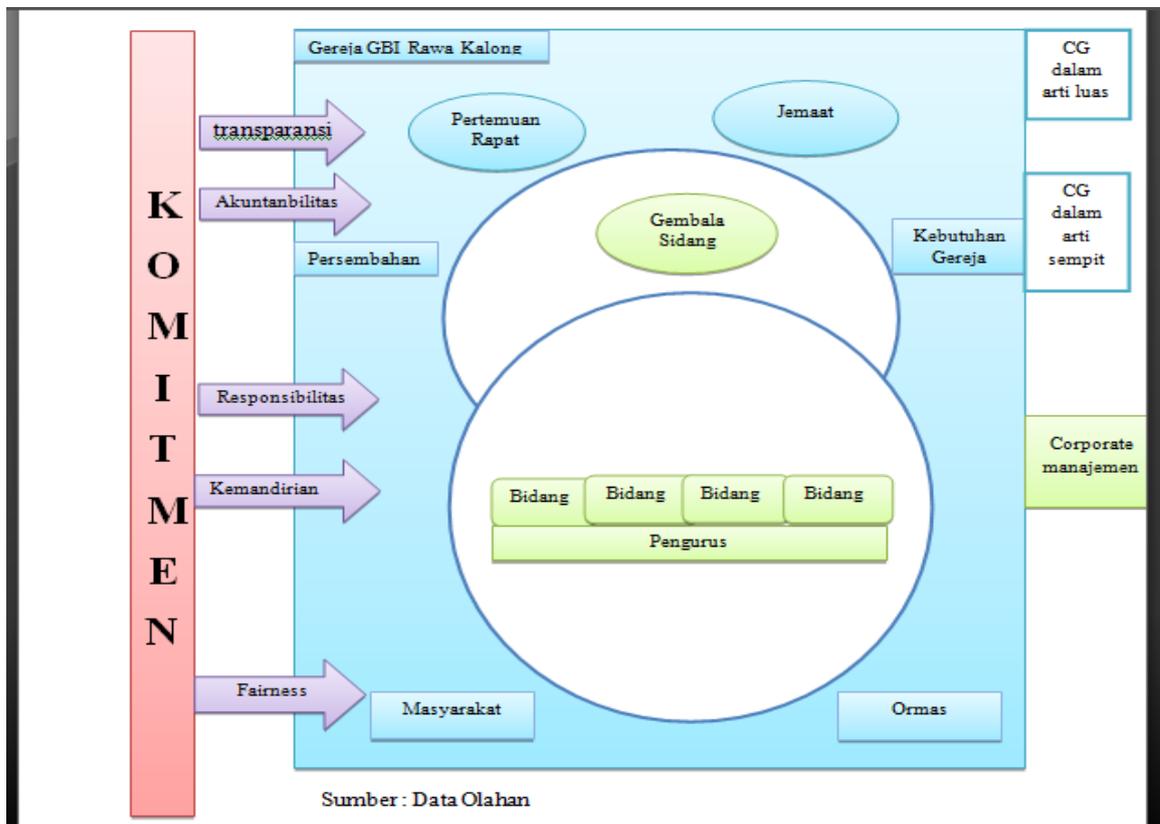
Tabel 1. Hasil Pemetaan Tata Kelola GBI Rawa Kalong

No	Unsur <i>Good Corporate Governance</i>	Hasil Observasi	Standar Penilaian	Kesimpulan
1.	Transparansi	Gereja GBI Rawa Kalong sudah terbuka dalam mengemukakan seluruh aktivitas kegiatan Gereja, informasi data keuangan Gereja, Renungan Firman di melalui warta Gereja sebagai pusat informasi. Hanya saja pada saat rapat Gereja, perwakilan dari jemaat tidak di ikut sertakan dalam pengambilan keputusan.	Baik	Kegiatan dan informasi keuangan sudah dijalankan secara transparan tetapi pada saat rapat, perwakilan jemaat tidak dilibatkan.
2.	Akuntabilitas	Gereja sudah melakukan tanggung jawab atas kegiatan yang ada di Gereja oleh masing-masing pengurus kepada jemaat terutama laporan keuangan yang sudah	Cukup Baik	Pertanggungjawaban atas kegiatan sudah sesuai dengan laporan keuangan Gereja yang diinformasikan kepada jemaat sudah cukup baik.

		dicatat secara sederhana sehingga jemaat ,mudah memahaminya.		
3.	Responsibilitas	Pengurus dan Pelayan sudah melakukan setiap tugas dan tanggungjawab sesuai dengan aturan dasar Gereja Bhetel Indonesia yang disampaikan Gembala Sidang.	Cukup Baik	Mematuhi aturan dasar mengenai tata kelola pada Gereja
4.	Independensi	Gereja sudah independen dalam mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak atau entitas manapun.	Cukup Baik	Gereja GBI Rawa Kalong dalam tata kelolanya dilakukan secara independensi.
5.	Kewajaran	Gereja GBI Rawa Kalong senantiasa memperhatikan kehidupan pengurus, Jemaat serta dilingkungan Gereja atas dasar kasih tanpa membedakan satu sama lain dan tidak mendominasi kepentingan pemangku sendiri.	Cukup Baik	Gereja GBI Rawa Kalong, mempunyai kepedulian terhadap Pegurus dan jemaat serta lingkungan Gereja.

Bangun tata kelola GBI Rawa Kalong adalah seperti disajikan pada Gambar 9.

Gambar 9. Bangun Tata Kelola GBI Rawa Kalong



AKUNTANSI GBI RAWA KALONG

Prosedur akuntansi GBI Rawa Kalong masih menggunakan prosedur akuntansi tradisional. Prosedur tersebut tidak mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang pelaporan keuangan nier laba. Format dan isi Laporan Keuangan GBI Rawa Kalong seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Laporan Posisi Keuangan GBI Rawa Kalong

GBI Rawa Kalong Laporan Posisi Keuangan Tahun 2019	
Aset Lancar	
Kas dan setara kas	Rp. 43.334.400
Piutang	-
Perlengkapan	Rp. 2.370.000

Total Aset Lancar	Rp. 45.704.400
Aset Tetap	
Peralatan	Rp. 1.745.000
Akm. Peny. Peralatan	Rp. 872.500
Total Aset Tetap	
Total Aset	Rp. 2.617.000
Liabilitas	
Liabilitas Jangka Pendek	-
Liabilitas Jangka Panjang	-
Aset Neto	
Tidak Terikat	Rp. 48.321.400
Terikat Temporer	-
Terikat Permanen	-
Total Aset Liabilitas dan Aset Neto	Rp. 48.321.400

Sumber: Data Olahan

a) Aset

Kas dan setara kas yang disajikan dalam laporan posisi keuangan merupakan total atau jumlah dari aset bersih pada akhir tahun. Aset untuk Gereja GBI Rawa Kalong hanya terdiri dari kas dan setara kas dan tidak memiliki piutang dan persediaan. Dalam laporan posisi keuangan khususnya kelompok aset tidak disajikan nilai dari investasi dan surat berharga karena Gereja GBI Rawa Kalong tidak mencatat atau melaporkan nilai investasi dan surat berharga yang dimiliki dalam laporan tahunan Gereja sehingga tidak diketahui berapa jumlah nilai dari investasi dan surat berharga.

b) Kewajiban dan Aset Bersih

GBI Rawa Kalong tidak memiliki saldo kewajiban pada akhir tahun karena telah melunasi kewajiban sebelum akhir tahun. Aset bersih Gereja GBI Rawa Kalong terdiri dari aset bersih tidak terikat dan aset bersih terikat temporer. Nilai aset bersih terikat temporer dalam laporan posisi keuangan merupakan saldo akhir hasil dari perhitungan sumbangan terikat dikurangi penggunaan untuk biaya-biaya pembatasan dalam suatu periode pelaporan, perhitungannya disajikan dalam catatan laporan posisi keuangan merupakan hasil perhitungan jumlah pendapatan dan penghasilan tidak terikat dikurangi jumlah beban dan pengeluaran.

Penyajian Laporan Aktivitas GBI Rawa Kalong Menurut PSAK No 45 adalah seperti disajikan pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3
Laporan Aktivitas GBI Rawa Kalong

GBI Rawa Kalong		
Laporan Aktivitas		
Tahun 2019		
Pendapatan dan penghasilan tidak terikat:		
Sumbangan	Rp.	5.964.500
Persembahan KRT	Rp.	802.000
Persembahan Natal	Rp.	4.469.000
Pendaoatan Lain-lain	Rp.	355.000
Jumlah Pendapatan	Rp.	11.590.500
Beban		
Biy. Raker Pengurus	Rp.	3.673.000
Biy. Sekolah Minggu	Rp.	1.099.000
Biy. Bingkisan Hari Raya	Rp.	628.000
Biy. Family Day	Rp.	4.000.000
Biy. PBB Gereja	Rp.	67.000
Biy. Admin Gereja	Rp.	150.000
Jumlah Beban	Rp.	9.617.000
Kenaikan Jumlah Aset Bersih Tidak Terikat	Rp.	1.973.500
Perubahan Aset Terikat Temporer		
Sumbangan		xx
Penghasilan Investasi		xx
Kenaikan/penurunan aset neto terikat temporer		xx
Perubahan Aset Neto Terikat Permanen		
Sumbangan		xx
Penghasilan Investasi		xx
Kenaikan/penurunan aset neto terikat Permanen		xx
Kenaikan Aset Neto		xx
Aset Neto Awal Tahun		xx
Aset Neto Akhir Tahun		xx

Sumber: Data Olahan

Laporan aktivitas menyajikan saldo aset bersih pada akhir tahun yang merupakan hasil dari penjumlahan kenaikan aset bersih dan saldo aset bersih awal tahun. Penjelasan atas Laporan Aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat

Dalam laporan pendapatan dan penghasilan tidak terikat terdiri dari sumbangan, persembahan KRT, persembahan natal, dan ucapan syukur. Nilai sumbangan berasal

dana yang dikumpulkan oleh jemaat melalui kegiatan usaha dana Gereja. Untuk persembahan KRT merupakan hasil dari dana ibadah kebaktian persekutuan rumah tangga, persembahan natal merupakan akumulasi dari seluruh kegiatan natal, dan pendapatan lain-lain merupakan hasil dari persembahan atas ucapan syukur dari jemaat.

b) Aset Bersih Di Bebaskan Dari Pembatasan

Pemenuhan program pembatasan yang termasuk dalam aset bersih yang dibebaskan dari pembatasan merupakan total aset yang dikeluarkan untuk program pembatasan, nilai ini juga merupakan langsung dari jumlah aset yang pembatasannya telah berakhir karena telah digunakan untuk pemenuhan program yang telah dibatasi.

c) Jumlah Pendapatan, Penghasilan dan Sumbangan Lain

Merupakan total dari penjumlahan aset yang berakhir pembatasannya dengan jumlah pendapatan dan penghasilan tidak terikat.

d) Beban dan Pengeluaran

Semua penggunaan dana untuk membiayai program setiap komisi/bidang, operasional Gereja, peluasan kewajiban kesinode dan lain-lain.

e) Pemenuhan Program Pembatasan

Total sumabangan terikat, dan aset bersih yang terbebaskan dari pembatasan.

Penyajian Laporan Arus Kas GBI Rawa Kalong menurut PSAK No 45 (hasil rekonstruksi) disajikan pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Laporan Arus Kas GBI Rawa Kalong

Laporan Arus Kas Gereja GBI Rawa Kalong Tahun 2019	
Kas dari persembahan	Rp. 32.432.000
Biy. Keamanan	(Rp. 839.000)
Biy. Lta	(Rp. 9.229.500)
Biy. Pengkotbah	(Rp. 4.500.000)
Biy. Pemusik	(Rp. 3.400.000)
Biy. Transport	(Rp. 6.000.000)
Biy. Kosnumsi Rapat	(Rp. 1.526.000)
Kas Bersih Yang Diterima Dari Aktivitas Operasi	Rp. 3.537.500
Aktivitas Investasi	
Pembelian Investasi Bangunan	(Rp. 7.125.500)
Kas Yang Digunakan Untuk Investasi	(Rp. 7.125.500)
Aktivitas Pendanaan	xx

Aktivitas Pendanaan Lain	xx
Kenaikan Penurunan Neto Kas dan Setara Kas	(Rp. 3.588.000)

Sumber: Data Olahan

a) Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Akun-akun yang disajikan adalah penambahan dan pengurangan arus kas pada perkiraan terikat dengan operasional Gereja seperti kas dari persembahan, biaya konsumsi, biaya transport, biaya Lta dan biaya lain-lain yang terkait dengan kegiatan operasional Gereja GBI Rawa Kalong.

b) Arus Kas Dari Investasi

Yaitu semua penerimaan dan pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi Gereja.

c) Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Yaitu perkiraan penerimaan dari kontribusi jemaat yang penggunaannya dibatasi, pelunasan.

Hasil pengabdian kepada masyarakat di GBI Rawa Kalong menunjukkan bahwa di GBI Rawa Kalong belum terdapat penerapan tata kelola perusahaan secara formal. GBI Rawa Kalong belum memiliki seluruh struktur dan proses tata kelola seperti yang seharusnya. GBI Rawa Kalong misalnya tidak memiliki pedoman khusus Tata Kelola. Namun dalam batas tertentu GBI Rawa Kalong telah memiliki tata kelola sendiri yang khas. Struktur tertinggi dalam tata kelola GBI Rawa Kalong adalah jemaat. Jemaat merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola Gereja Bethel Rawa Kalong. Jemaat merupakan *principal* atau pemilik. *Top management* dari gereja adalah Gembala dan Ibu Gembala. Untuk mengatasi masalah keagenan antara Jemaat dengan Gembala, dibuat pelaporan bulanan dan tahunan berdasarkan prinsip Takut Kepada Tuhan menurut keyakinan Ummat Kristiani. Tidak ada satuan internal audit pada Gereja Bethel Rawa Kalong. Tidak ada audit oleh auditor eksternal untuk memeriksa Laporan Keuangan Gereja Bethel Rawa Kalong. Dengan demikian tidak ada internal audit charter karena memang tidak ada internal auditnya. Audit digantikan dengan falsafah takut kepada Tuhan. Terdapat perencanaan tahunan yang disetujui oleh Gembala dan jajaran dibawahnya pada pertemuan tahunan. Namun pertemuan tahunan tidak dihadiri oleh Jemaat atau perwakilan dari Jemaat. Ini merupakan struktur dan proses yang perlu ditingkatkan karena Jemaat merupakan organ tertinggi dalam tata kelola gereja. Karena itu Jemaat atau perwakilannya harus menghadiri pertemuan tahunan GBI Rawa Kalong sebagai *principal*.

Perencanaan tahunannya tidak disajikan pada *Statement of Corporate Intent* seperti pada struktur tata kelola korporasi. Penyajiannya hanya pada bentuk perencanaan tahunan biasa dengan aplikasi word dan excel.

Sistem pengarsipan Gereja Bethel Rawa Kalong juga belum memadai sehingga masih terdapat kendala dalam *filing and retrieval system* arsip-arsip gereja.

Berdasarkan hasil pemetaan dan pembahasan tersebut di atas maka GBI Rawa Kalong seyogyanya melakukan langkah-langkah perbaikan berikut ini:

1. Jemaat atau perwakilannya harus hadir pada pertemuan tahunan GBI Rawa Kalong. Jemaat merupakan organ tertinggi pada GBI Rawa Kalong sehingga harus memberi persetujuan terhadap perencanaan untuk tahun yang akan datang dan memberi persetujuan pada pertanggungjawaban tahun yang lalu.
2. Pertanggungjawaban agar dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan seperti Daftar Aset, Daftar Donatur, Daftar Pengurus, dan Lampiran Lainnya yang dapat menambah nilai informasi Laporan GBI Rawa Kalong.
3. Sistem pengarsipan agar diperbaiki sehingga akan menambah nilai informasi dan meningkatkan kualitas tata kelola dan operasi GBI Rawa Kalong.
4. Untuk meningkatkan kemampuan tingkat pelayanan, GBI Rawa Kalong agar juga mencari dana dari pihak eksternal, jangan hanya mengandalkan dana dari Jemaat.
5. Membuat pedoman singkat tata kelola tersendiri untuk GBI Rawa Kalong. Pedoman ini akan memberikan arahan kontinu mengenai tata kelola GBI Rawa Kalong.

SIMPULAN DAN SARAN

Tata kelola organisasi telah lebih banyak diimplementasikan pada sektor komersial, ketimbang pada sektor nirlaba. Telah banyak buku-buku dan artikel mengenai *good corporate governance*. Namun sangat kurang buku-buku mengenai *public sector governance*.

Tujuan pengabdian ini adalah untuk membantu implementasi good governance pada GBI Rawa Kalong. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek pengabdian adalah GBI Rawa Kalong.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa di GBI Rawa Kalong belum terdapat penerapan tata kelola perusahaan secara formal. GBI Rawa Kalong belum memiliki seluruh struktur dan proses tata kelola seperti yang seharusnya. GBI Rawa Kalong misalnya tidak memiliki pedoman khusus Tata Kelola. Namun dalam batas tertentu Gereja Bethel Rawa Kalong telah memiliki tata kelola sendiri yang khas. Struktur tertinggi dalam tata kelola Gereja Bethel Rawa Kalong adalah jemaat. Jemaat merupakan organ tertinggi dalam tata kelola Gereja Bethel Rawa Kalong. Jemaat merupakan *principal. Top management* dari gereja adalah Gembala dan Ibu Gembala. Untuk mengatasi masalah keagenan antara Jemaat dengan Gembala, dibuat pelaporan bulanan dan tahunan berdasarkan prinsip Takut Kepada Tuhan. Tidak ada satuan internal audit pada Gereja Bethel Rawa Kalong. Tidak ada audit oleh auditor eksternal untuk memeriksa Laporan Keuangan Gereja Bethel Rawa Kalong. Dengan demikian tidak ada internal audit charter. Audit digantikan dengan falsafah takut kepada Tuhan. Terdapat perencanaan tahunan yang disetujui oleh Gembala dan jajaran dibawahnya pada pertemuan tahunan. Namun pertemuan tahunan tidak dihadiri oleh Jemaat atau perwakilannya. Perencanaan tahunannya tidak disajikan pada *Statement of Intent* seperti pada korporasi. Sistem pengarsipan Gereja Bethel Rawa Kalong juga belum memadai sehingga masih terdapat kendala dalam filing and retrieval system.

Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka disarankan kepada GBI Rawa Kalong agar:

1. Jemaat hadir pada pertemuan tahunan Gereja Bethel Indonesia. Jemaat merupakan organ tertinggi pada Gereja Bethel Indonesia sehingga harus memberi persetujuan terhadap perencanaan untuk periode yang akan datang dan memberi persetujuan pada pertanggungjawaban periode yang lalu.
2. Pertanggungjawaban agar dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan seperti Daftar Aset, Daftar Donatur, Daftar Pengurus, dan Lampiran Lainnya yang dapat menambah nilai informasi Laporan Gereja Bethel Indonesia.
3. Sistem pengarsipan agar diperbaiki sehingga akan menambah nilai informasi dan meningkatkan kualitas tata kelola dan operasi Gereja Rawa Kalong.
4. Gereja Bethel Indonesia mencari donatur dari pihak eksternal, jangan hanya mengandalkan dana dari jemaat

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, D. J., & Jonge, D. C. (2011). *Apa Dan Bagaimana Gereja? Pengantar Sejarah Eklesiologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Bomba, P. (2020). *Penerapan Good church Governance Pada Keuangan Organisasi Gereja Pauk Kanaan*. Jakarta.
- Dewi, K. G., Atmadja, A. W., & Adiputra, M. P. (2015). *Konsep Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Volume 3 No 1 Tahun 2015 .
- Endra, Y. (2016). *PSAK Nomor 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*. Dipetik Juni 05, 2021, dari feelinbali.blogspot.com: <https://feelinbali.blogspot.com/>
- FR, W. (2009). *Mengelola Organisasi Non Profit*. Dipetik Mei 17, 2021, dari komangadi.wordpress: <http://komangadi.wordpress.com>
- Fransiskus, R. (2011). *Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan*. Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi , 61.
- Herutomo, B. (2020). *Gereja, Arti, dan Tujuan Menurut Alkitab*. Dipetik Mei 13, 2021, dari kompasiana.com/bambangherut0m0b711: <https://www.kompasiana.com>
- KNKG.(2019). *Prinsip Corporate Governance*. Dipetik Juni 06, 2021, dari <https://accounting.binus.ac.id/2019/12/10/prinsip-corporate-governance/>.
- Muslih, Mochamad. (2019). *Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah*. STIA LAN Bandung, Konferensi Nasional Ilmu Administrasi
- Muslih, Mochamad. (2019). *Tata Kelola Berkelanjutan Bagi BUMN Bidang Keuangan Non Publik*. Firm Journal of Management Studies, Vol. 4 No. 2.
- Manogu, R. (201, Mei). *Sistem Pemerintahan dan Jabatan Gereja*. Dipetik Mei 14, 2021, dari studiialkitab.com: <http://www.studiialkitab.com/2010/05/sistem-pemerintahan-dan-jabatan-gereja.html>.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: <http://repository.wima.ac.id/690/2/Bab%201.pdf>